

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat penelitian.....	6
D. Kerangka teoritis.....	7
E. Metode penelitian.....	14
BAB II KARAKTERISTIK PERATURAN MENTERI	
A. Konsep Dasar pembuatan Peraturan Menteri	18
B. Historis kedudukan Peraturan Menteri dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan.....	22
C. Contoh Peraturan Menteri ditingkat pemerintah pusat dari tiap tiap kementrian.....	25
BAB III <i>LEGAL STANDING</i> PERATURAN MENTERI TERHADAP KEWENANGAN GUBERNUR	
A. Dasar keberlakuan Peraturan Menteri	38
B. Hubungan antara Peraturan Menteri dengan Kewenangan yang dimiliki Gubernur melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Ketetapan MPR Nomor XX/MPR/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01 / Per / M.KUKM / I / 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, pencedaran dan Penjualan dan Perizinan minuman beralkohol.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 51 / Permentan / OT.140 / 10 / 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 35 / Menhut-II / 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9 / Menhut-II / 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 / Permentan / OT.140 /4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perizinan Limbah B3.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 / M.IND / PER / 6 /2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500)
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 / M-DAG / PER / 9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 / Permentan / OT.140 / 10 / 2009 tentang Budidaya Buah dan Sayur yang Baik.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147 /M – IND / PER / 10 / 2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 / M-IND / PER / 2/2010(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231)
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 / Menhut-II / 2010tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 376) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27 /Menhut-II / 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 646)

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 / Menhut-II / 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 / Menhut-II /2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 / Menkes / Per / I / 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 / Menkes / Per / VIII / 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 / Menkes / Per / VI / 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2012 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16 / Menhut-II / 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408)

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565)
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 24 / Menhut-IV / 2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.